

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.1064/Pid.B/2010/PN.Mks)

**OLEH
MUHAMMAD RAJAB ALI
B 111 06 001**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 1064/Pid. B/2010/PN.MKS)

OLEH

MUHAMMAD RAJAB ALI

B 111 06 001

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2012

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1064/Pid. B/2010/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD RAJAB ALI

B 111 06 001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada Hari Senin, 20 Februari 2012

PANITIA UJIAN

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199204 2 002

Dekan

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP. 19641231 198811 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : MUHAMMAD RAJAB ALI

Nomor induk : B 111 06 001

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 1064/Pid.
B/2010/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199204 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RAJAB ALI
Nomor induk : B 111 06 001
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor:
1064/Pid.B/2010/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 2012

a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Unhas,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD RAJAB ALI, B111 06 001, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1064/Pid. B/2010/PN.MKS)*, di bawah bimbingan *Andi Sofyan* selaku pembimbing I dan *Haerana* selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap delik kelalaian dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan delik kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2) Pertimbangan hakim dalam memustukan perkara putusan Nomor : 1062/Pid.B/2010/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1064/Pid.B/2010/Pn Mks)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapat terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Drs. Ramsul dan Ibunda Sitti Faridah, S.Sos yang senantiasa memberi pengarahan dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka,
2. Adik tercinta, Muh. Fadli Dwi Saputra dan Rezkiwani Fitria Wulandari yang senantiasa menghibur saya dan memberikan semangat kepada penulis,
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., D.F.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada Penulis,
6. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan bapak Hj. Haeranah, S.H.M.H, terima kasih yang sebesar-besarnya

atas segala arahan, waktu, bimbingan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini,

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam berdiskusi mengenai kasus yang saya teliti ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian,
9. Sahabat-sahabat dan Rizki Ekaputri, S.H. yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini,
10. Teman-teman KKN Profesi Tahun 2010 Lokasi Polsekta Mamajang, teman-teman Eksaminasi 2006, Keluarga besar UKM Hockey Unhas dan rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan masukan bagi penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini, terima kasih atas sarannya,
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti ini,

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai
ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. *Amien*

Makassar, 18 Februari 2012
Penulis,

Muhammad Rajab Ali

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Delik	12
1. Pengertian Delik	12
2. Unsur Delik	13
B. Kesalahan	15

1. Dolus	15
2. Culpa	18
C. Anak	30
1. Pengertian Anak	30
2. Sanksi Pidana bagi Anak Nakal	35
D. Ketentuan Pidana Perbuatan yang Menghilangkan Nyawa orang lain.....	47
E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Lokasi Penelitian.....	52
B. Jenis dan Sumber data	52
C. Teknik Pengumpulan data	53
D. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	55
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak terhadap Perkara Nomor: 1064/Pid.B/2010/PN.Mks.....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1064/Pid.B/2010/PN.Mks.....	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia dan bangsa. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat rentan akan berbagai tindak pidana. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat perekonomian dan pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar.

Timbulnya berbagai upaya tersebut tentunya mempengaruhi suprastruktur dan infrastruktur negara. Bukan hanya itu, kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan bangsa dan negara.

Anak adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak pun memiliki peranan strategis dan

karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa yang akan datang, karena kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan serta diskriminasi sanksi pidana. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu secara hukum, ekonomi, social maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. Selain itu, anak harus diperlakukan khusus tumbuh dan berkembang secara wajar dan rohaninya.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hokum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bansa. Untuk itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan social serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan, maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Sehingga keluarga atau orang tua berperan bagi pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental anak, dimana orang tua harus mendidik anak sejak dini dengan dasar pendidikan yang berguna bagi anak. Salah satu contoh atau sebahagian kecil anak harus diberikan pengetahuan yaitu mengenai kejahatan atau pelanggaran lalu lintas untuk mencegah peristiwa kecelakaan lalu lintas dan memberitahukan bahwa lalu lintas mengandung bahaya adalah kenyataan yang tidak dapat di sangkal akan mengancam nyawa si anak dan nyawa orang lain. Maka dari itu, si anak tidak boleh mengendarai kendaraan di jalan raya sebelum mendapat surat izin mengemudi (SIM), selain itu anak harus berhati-hati saat mengendarai kendaraan di jalan raya dan hendaknya memiliki kesadaran ketika berada di jalan dengan pertimbangan tidak semata-mata pada keselamatannya sendiri akan tetapi juga pada keselamatan orang lainnya.

Anak juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pula lah moral anak tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas dan mampu

mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak nakal.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum pun diberikan kepada anak demi masa depannya. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Aturan hukum yang telah dirangkum tersebut, antara lain: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perangkat hukum yang telah tersedia tersebut tentunya berfungsi untuk menciptakan penegakan kebebasan dan hak asasi anak, serta terwujudnya kesejahteraan bagi anak di Indonesia.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak

untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak. Hal tersebut diperkuat lagi oleh, Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Upaya terakhir ini berarti apabila masih dapat diberikan upaya lainnya maka, tindakan penangkapan, penahanan, ataupun pidana penjara sebaiknya tidak dilakukan demi menjamin kesejahteraan kehidupan anak tersebut. Bukan hanya itu, kekhususan lain yang diperoleh oleh anak yang melakukan tindak pidana adalah haruslah memperoleh bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang Perlindungan Anak.

Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain mati merupakan suatu tindak pidana pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena akibat dari perbuatan anak tersebut yang karena

kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana ini hanya diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 Undang-undang Pengadilan Anak. Dilain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapat lah ditiadakan.

Masalahnya, di era yang semakin mengglobal ini, masyarakat khususnya bagi anak sebagai pengguna jalan terkadang tidak sadar akan pentingnya tata tertib dalam berlalu lintas. Kurang mengertinya akan perundang-undangan dan peraturan lalu lintas di jalan mengakibatkan seolah-olah alat Negara yang mengatur akan hal tersebut kelihatannya akan menjadi kewalahan.

Dalam mengurus peristiwa lalu lintas jalan, maka harus kita pisahkan antara kejahatan dan pelanggaran hal ini yang sulit dalam peristiwa lalu lintas adalah membuktikan kesengajaan sebagai salah satu syarat untuk peristiwa kejahatan, sebab dalam peristiwa lalu lintas jalan kebanyakan terjadi dengan tidak di sengaja.

Kejahatan lalu lintas yang terjadi dengan sengaja merupakan hal tidak lazim lagi, akan tetapi yang sering terjadi adalah kejahatan karena salahnya (lalainya, alpanya, ketidak hati-hatianya dan sebagainya)

Kejahatan lalu lintas berkisar terbatas mengenai beberapa Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, dan Pasal 410 KUHP.

Bahwa lalu lntas mengandung bahaya adalah kenyataan yang tidak dapat di sangkal. Jumlah orang yang meninggal senatiasa bertambah banyak. Upaya dan usaha menaggulangi serta mencegah hal tersebut itu juga semakin banyak di lakukan akan tetapi mengurus peristiwa lalu lintas jalan adalah suatu tugas yang sulit, sebab pengusutan dapat terdiri dari berbagai atau beraneka ragam keahlian. Peranan berbagai bidang keilmuan menjadi sangat fital sebagai contoh, peranan ilmu kedokteran dala menentukan apakah peristiwa tersebut murni merupakan kecelakaan atau kesalahan manusiawi dapat di lihat dari hasil pemeriksaan (visum et repertum).

Adapun hal-hal yang mungkin bisa penyebab terjadinya peristiwa lalu lintas yaitu:

1. Keadaan udara dan cuaca;
2. Keadaan jalan;
3. Pengemudi;
4. Orang berjalan kaki;

5. Penumpang;
6. Keadaan kendaraan;
7. Jalan trem atau kereta api;
8. Benda-benda lain yang merintang lalu lintas;
9. Kereta hewan;
10. Berbagai macam sebab lainnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam peristiwa lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan karena lalai atau alpanya. Hal ini menjadi penting titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut dimulai dari menentukan apakah kecelakaan tersebut disengaja atau tidak disengaja.

Kecelakaan karena lalai atau alpanya menjadi sulit untuk ditentukan mengingat banyaknya kategori yang harus diuraikan satu persatu.

Hal yang menjadi tema sentral dari skripsi ini penulis adalah kasus kecelakaan, yang mana karena kecelakaan tersebut korbannya meninggal dunia dan pelakunya adalah anak dibawah umur berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekitar jam 19.00 wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang anak tersebut alami, bertempat Jl. Batua Raya Makassar, yakni sebuah sepeda motor merk Yamaha Fiz.R No.Pol.: DD 5100 AO yang anak tersebut kemudian kemudian menabrak seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki yang

mengakibatkan korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar atas kasus/perkara yang penulis teliti, diputuskan bahwa tindakan pelaku berada dalam kategori delik kelalaian. Jadi kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan yang tidak sengaja.

Dalam skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah penerapan hukum dalam putusan perkara No.1064/Pid.B/2010/PN.MKS tentang delik kelalaian yang mengakibatkan kematian oleh anak telah sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan penulis ingin mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.1064/Pid.B/2010/PN.MKS

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai hal ikhwal delik kelalaian bagaimana posisi hukum delik kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dilakukan oleh anak dan bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara No.1064/Pid.B/2010/PN.MKS apa telah sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “tinjauan yuridis terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (studi kasus no. 1064/Pid.B/2010/PN.MKS)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1064/Pid. B/2010/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian khususnya dalam perkara putusan nomor: 1064/Pid.B/2010/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor: 1064/Pid.B/2010/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal-hal berikut:

1. Diharapkan agar skripsi ini mampu menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana,
2. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik

1. Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu *delickt*, *delicta* atau *delictum*. Delik adalah merupakan istilah tehnik yuridis yang hingga saat ini dikalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesian, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang banyak digunakan oleh sarjana hukum, diantaranya yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan mengenai istilah *strafbaarfeit* disebabkan belum ada terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht dari bahasa Belanda kebahasa Indonesia A. Zainal Abidin Farid (1983: 4) memakai istilah peristiwa pidana, belum menyetujui kalau perkatan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana, karena berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.

Moeljatno, (Rusli Effendy, 1980: 47) merumuskan delik adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya Rusli Effendy, (1980: 55) merumuskan peristiwa pidana adalah “suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, sebabnya saya memakai hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis”.

Tresna (Rusli Effendy, 1980: 53) merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:

Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pembedaan.

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Unsur Delik

Pandangan monistis, (Andi Zainal Abidi Farid, 1983: 46) merumuskan bahwa “semua unsure pidana adalah sama dengan syarat pembedaan orang yang melakukan peristiwa pidana dengan memperhatikan semua unsur peristiwa pidana”.

Adapun unsur-unsur delik menurut pandangan Monistis, (Andi Zainal Abidin Farid, 1983: 47) adalah:

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Adanya sifat melawan hukum
- c. Tidak ada dasar pemaaf
- d. Adanya kesalahan yang meliputi dolus dan culpa.

Selanjutnya menurut aliran dualistis, (Andi Zainal Abidin Farid, 1983: 47) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-Undang)
- b. Perbuatan itu melawan hukum
- c. Tidak dasar pembeda

Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur perbuatan dan unsur perbuatan.

- 1. Unsur perbuatan meliputi:
 - a. Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.
- 2. Unsur perbuatan meliputi:
 - a. Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembeda

Pemisahan antara unsur pembuat dengan dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan tehnik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pembedaan

yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu hakim hendak menetapkan putusannya maka unsure tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.

B. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang yang mampu member pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat di persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya.

Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu:

1. Pembuat harus melawan hukum,
2. Harus ada kesalahan

Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kelalaian (*culpa*)

Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

1. Dolus

a. Pengertian Dolus

Rusli Effendy (1989: 80), menuliskan dolus atau sengaja menurut Memorie Van Teoliching (Risalah penjelasan Undang-Undang) berarti si Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan berserta akibatnya).

Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.

Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
2. Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.

Jonkers (Rusli Effendy 1989: 80) sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan.

Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Adanya perangsang,

2. Adanya kehendak,
3. Adanya tindakan

b. Bentuk-Bentuk Dolus

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oggmerk*)

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheis of noodzakelijkheids bewestzijn*)

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya. Misalnya A hendak membunuh B yang berada di balik kaca jendela. Sebelum peluru mengenai si B terlebih dahulu A dapat memastikan bahwa peluru akan menghancurkan kaca, walaupun sesungguhnya kehancuran kaca tersebut tidak menjadi maksud A, akan tetapi seandainya tidak terlebih dahulu merusak kaca, maka A tidak mungkin dapat membunuh B

3. Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Dalam KUHPidana, sendiri dolus atau sengaja tidak merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja. Jadi tentang penafsiran kesengajaan lebih dipercayakan kepada perkembangan kesadaran masyarakat sebagai pemain (*medespeler*) dan penonton (*toeschouwers*).

2. Culpa

a. Pengertian Kealpaan (*culpa*)

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige reden heeft om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa.

Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi

Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,

dimana dalam pengajuan Rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari

Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”

Untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “*kekurang hati-hatian*”, “*kurangnya perhatian*” seperti yang dimaksud di atas, para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Pompe misalnya, telah menggunakan istilah “*onachtzaamheid*”, sedangkan Simaons telah menggunakan istilah-istilah “*gemis aan voorzichtigheid*” dan “*gemis aan voorzienbaarheid*”. Van Bemmlen telah menggunakan istilah “*roekeloos*”

Sactohid Kartanegara (Sri Widyastuti 2005: 40) merumuskan delik culpa seiring dengan *Culpose Delicten* yaitu:

Tindak-tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *Doleuse delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delicten* adalah delik yang mempunyai unsure culpa atau kesalahan (*Schuld*).

Contoh: -Pasal 359 KUHPidana

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun
-Pasal 188 KUHPidana

Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-, jika terjadi bahaya kepada mau orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Lamintang (1997: 204) mengemukakan tentang delik *culpa* adalah “*Culpose delicten* atau delik yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut terjadi dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum”.

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik culpa yang berdiri sendiri. Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal-Pasal 188. 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (*vide di atas*) juga sering disebut sebagai *delict culpoos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpoos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsure “dikethui” atau “sepatutnya

harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsure tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen *culpa*, yang ditempatkan sesudah *opzet* dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus berjanggungjawab dengan mendapat pidana.

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja (tidak diinsyafi) akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peratran hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik *culpa* pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

b. Jenis-Jenis Culpa

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* atau *merkelijke schuld, grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang *relevan* dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang

kealpaan. Anrata lain oleh Vos (Bambang Poernomo 1992: 174)

dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*);
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang.

Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos (Bambang Poernomo 1992: 175), diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam

pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti *implicit* tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak

mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut Memorie van Toelichting atau risalah penjelasan Undang-Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Rusli Effendy (1989: 85) Jurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati".

c. Jenis-Jenis Culpa lata

Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik culpa di atas, yakni delik yang di dalamnya terdapat unsure kurang kehati-hatian, maka *culpa lata* tersebut mempunyai corak tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid, (1981: 228) menyimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang mengakui corak dari culpa lata yaitu:

- a. Culpa lata yang diinsyafi atau disadari (*Bewuste Schuld*)
Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah.
- b. Culpa lata yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*)

Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.

Di dalam KUHPidana tidak terdapat pembagiannya, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). *Bewuste schuld* sukar dibedakan dengan *voorwaardelijk opzet*, karena keduanya dapat digambarkan sebagai seorang pembuat delik yang telah membayangkan akibat yang akan terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga. Pada *onbewuste schuld* terhadap si pembuat dalam berbuat tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia membayangkannya.

Jonkers (Bambang Poenomo 1992: 174), memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi ditempat lain itu ia mengetahui ada orang sakit yang keadaanya sedemikian rupa sehingga akan meninggal apabila terkejut. Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaannya ditunjukan kepada kematian orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari (*bewuste sculd*) diberikan contoh mengadakan pesta di dalam ruangan yang banyak mempergunakan penerangan (lilin) di dekat bahan yang mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan alat pemadam api, maka kebakaran yang tidak dikehendaki itu apabila terjadi merupakan kealpaan yang disadari karena orang itu insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari adalah melempar barang di luar gudang tanpa memikirkan kemungkinan bahwa orang lain akan selalu di situ, maka kealpaanya karena kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka yang seharusnya diingat kemungkinan itu.

Demikian terjadinya kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan(kemungkinan/

bersyarat), akan tetapi dapat pula terjadi kealpaan yang sedemikian ringannya sehingga tidak mudah dibedakan dengan peristiwa biasa yang kebetulan, yang perlu atau tidaknya celaan yuridis.

d. Perbedaan Antara *Dolus Eventualis* dengan *Culpa lata*

Dolus Eventualis adalah termasuk kedalam jenis deli dolus yakni delik yang didalamnya terdapat unsure kesengajaan.

Kesengajaan disini mempunyai 3 tingkata sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1989: 81) yaitu'

1. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah *motif* utama untuk adanya suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan dilakukan. Misalnya A berniat membunuh B, lalu A menembaknya.
2. Sengaja kesadaran akan kepastian: adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. Jonkers memberikan contoh sebagai berikut: A hendak menembak mati B yang duduk dibelakan kaca. Untuk mengenai sasarannya itu maka A harus menembak kaca itu sehingga pecah. A bersalah selain daripada membunuh (sengaja sebagai niat) juga telah dengan sengaja merusak barang (kesadaran akan kepastian). Walaupun niatnya hanya membunuh B tetapi ia juga menembak kaca itu untuk mencapai maksudnya. A mengetahui bahwa perbuatan (membunuh) bertalian dengan memecahkan kaca.
3. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu.

Mengenai *Dolus Eventualis* ini, Moeljatno (1983: 175) mengemukakan sebagai berikut:

Teori yang dikenal sebagai *inkauf nehmen* adalah teori mengenai *dolus eventualis* bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Andi Zainal Abidin Fadird (1981: 217) menggunakan istilah teori apa boleh buat sebagai terjemahan dari *inkauf nehmen*. Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat:

- a. Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik,
- b. Sika tetang kemungkinan itu andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya.

Mengenai syarat pertama, hal ini dapatt dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan mengenai syarat yang kedua, hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan tersebut.

Sebagai contoh sengaja insyaf akan kemungkinan, Utrecht (Sri Widyastuti 2005: 42) dapat disebut keputusan HOF Amserdam tertanggal 9 maret 1911 W.Nr. 9154 dan putusan Hoogeraad tertanggal 19 juni 1911 W.Nr. 9203, yang paling terkenal dengan Hoorenche tart Arrest kasusnya: A hendak membalas dendam terhadap B di kota Hoorn. Dari kota Amsterdam A mengirim sebuah kue tar ke alamat B, dan dalam kue tersebut telah dibumbuhi racun.

A insyaf akan kemungkinan besar bahwa isteri B turut serta memakan kue tersebut. Walau A tahu bahwa isteri B diluar dari perselisihannya dengan B, tetapi masih juga A tidak menghiraukan hal hidupnya isteri B. Oleh Hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap isteri B juga dilakukan dengan sengaja, meskipun matinya isteri B tidak dikehendaki oleh A

Sactohid Kartanegara (Sri Widyastuti 2005: 43) mengemukakan dasar perbedaan antara dolus dan culpa sebagai berikut:

1. Dolus
 - a. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
 - b. Perbuatan itu disebut *Doluse delicten*
 - c. Diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada *Culpose delicten*
2. Culpa
 - a. Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian/kealpaan
 - b. Perbuatan itu disebut *culpose delicten*
 - c. Ancaman hukumannya adalah lebih ringan daripada *doluse delicten*.

Antara sengaja insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan culpa lata yang disadari sukar dibedakan,

Van Hattum (Tongat 2009: 294) mengemukakan:

Seseorang yang bagaimanapun hendak mencapai tujuan yang diperdulukan bahwa orang lain dapat jaga menjadi korban, dan bila akibat itu benar-benar terjadi, maka ia mempunyai gejala insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bilamana seseorang itu dalam berusaha mencapai tujuan tersebut di atas, insyaf bahwa kemungkinan orang lain dapat menjadi korban, tetapi diharapkannya mudah-mudahan tidak terjadi korban-korban lain dibatasi sedapat mungkin, maka orang yang demikian itu mempunyai culpa lata yang diinsyafi.

Jonkers (M. Asy'ari 2008:24) berpendapat sebagai berikut:

Dolus eventualis terdapat bilamana pembuat memilih akibat yang diniatkannya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendakinya, daripada sama sekali tidak berbuat sedangkan *culpa* yang diinsyafi terdapat bilamana pembuat itu lebih suka tidak berbuat daripada terwujud akibat yang dikehendakinya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendakinya.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas mengenai corak perbedaan antara *dolus eventualis*, maka menjadi jelas bagi kita akan perbedaan diantara keduanya yakni pada *dolus eventualis*. Meskipun pelaku menginsyafi akan adanya akibat lain yang kemungkinan akan terjadi bilamana ia melakukan perbuatan itu, namun ada rasa ketidakperdulian akan akibat yang mungkin terjadi. Sedangkan bagi *culpa lata* yang diinsyafi, terdapat bilamana pembuat itu lebih suka untuk tidak berbuat daripada terwujudnya akibat yang tidak dikehendaki.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Defenisi anak secara nasional pada hakikatnya dapat dinilai berdasarkan batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Menurut hukum internasional, defenisi anak dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pengertian anak menurut konvensi tersebut adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaannya diperoleh lebih cepat.

Pengertian anak juga tertuang dalam hukum nasional di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut anak yang masih berada dalam kandungan juga telah berhak atas perlindungan hukum.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut adalah usia di mana anak telah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental, sehingga seseorang yang telah berusia melebihi 21 (dua puluh satu) tahun dianggap telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa:

Anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan batasan umur tersebut identik dengan ketentuan yang terdapat dalam “*Convention on The Rights of The Child*” (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Berdasarkan Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), batasan umur anak yang dapat diperiksa sebagai saksi di pengadilan tanpa sumpah ialah yang memiliki batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, dirumuskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal-hal tertentu tersebut merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dan dirasa memang perlu untuk dipertimbangkan sebagai alasan agar anak tersebut boleh untuk tidak mengikuti proses persidangan.

Berdasarkan konvensi yang dilakukan oleh *ILO (International Labour Organisation)* No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang telah disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 kategori syarat khusus anak yang telah ataupun belum kawin juga tidak diatur. Undang-undang ini merumuskan bahwa anak adalah semua orang yang berarti siapa saja yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur batasan usia seseorang masih dapat dikategorikan sebagai anak yakni 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan belum pernah kawin. Jadi, berapapun usia seseorang yang berurusan dengan hukum, apabila ia telah menikah, maka ia telah dianggap dewasa menurut Undang-undang ini.

Bukan hanya itu, penjelasan mengenai kriteria usia yang masih dapat digolongkan sebagai anak juga dijelaskan menurut hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kendatipun hukum adat tidak menyebutkan secara eksplisit adanya keseragaman batasan umur untuk anak. Namun, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 yang berorientasi pada hukum adat di Bali dapat kita tarik kesimpulan bahwa batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas).

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga diatur bahwa:

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut undang-undang ini, batas minimal dan maksimal seorang anak dapat diperiksa sebagai terdakwa adalah anak yang berusia minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas)

tahun. Dirumuskan pula bahwa seorang anak hanya boleh dijatuhkan pidana bila telah mencapai umur 8 (delapan) tahun saja.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana sedangkan usianya belum mencapai 8 (delapan) menurut Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya atau diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Wagianti Soetodjo (2005:7), proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralesitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut, antara lain:

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) sampai dengan 7(tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi tubuh, kehidupan emosional, bahasa anak, masa kritis pertama tumbuhnya seksualitas awal pada anak,
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak yang terdiri atas dua periode yaitu masa anak sekolah dasar dimana pola intelektual diawali dari keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, dan seterusnya, serta masa remaja (pra-pubertas) awal atau *pueral* dimana pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, dan liar. Sejalan dengan perkembangan fisik, perkembangan intelektual pun semakin berkembang sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar.
- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dilaam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Perubahan besar yang dialami anak

membawa pengaruh pada sikap dan tindakan yang lebih agresif pada anak.

Ketiga fase di atas merupakan fase yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum memutuskan suatu perkara atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Sebab, berdasarkan penggolongan fase tersebut, kemungkinan seorang anak melakukan suatu tindakan yang dapat diancamkan hukuman pidana sangat lah berpengaruh.

Anak yang dikenai ancaman pidana sering disebut dengan anak nakal. Dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, dirumuskan bahwa anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian anak yang digunakan dalam skripsi ini yakni dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada pengertian anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak yakni 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Sanksi Bagi Anak Nakal

a. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Berbagai instrumen internasional berupa standar PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) tentang peradilan anak telah memberikan arah yang cukup jelas mengenai bagaimana negara-negara di dunia ini membangun sistem peradilan anak yang lebih beradab. Hadi Supeno (2010:11) mengemukakan beberapa instrumen internasional standar PBB yakni di antaranya yaitu:

Riyadh Guidelines yang berisi pedoman PBB tentang pencegahan tindak pidana anak, *Beijing Rules* berupa peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan anak, *Havana Rules* berisi peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya, dan *Tokyo Rules* yang berisi peraturan standar minimum PBB untuk upaya-upaya nonpenahanan.

Selanjutnya ditambahkan oleh Nandang Sambas (2010:218-219) bahwa:

Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) 45/110- The Tokyo Rules, ditegaskan dalam *Rule 8- Sentencing disposition* tentang perlunya dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan menyangkut kebutuhan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, maka dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat menerapkan jenis sanksi dalam bentuk:

- 1) Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik (*admonotion*), teguran keras (*reprimand*), dan peringatan keras (*warning*),
- 2) Pelepasan bersyarat (*conditional dscharge*),
- 3) Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*),
- 4) Sanksi ekonomi dan pidana bersifat uang seperti denda harian (*economic sanction and monetary penalties, such as fine and day fines*),
- 5) Perampasan (*confiscation*) dan perintah pengambilalihan (*expropriation orders*),
- 6) Pembayaran ganti rugi pada korban atau perintah kompensasi lain (*restitution to the victim or a compensation order*),

- 7) Pidana bersyarat/tertunda (*suspended and deferred sentence*),
- 8) Pidana pengawasan (*probation and judicial supervision*),
- 9) Perintah kerja sosial (*a community service order*),
- 10) Pengiriman pada pusat kehadiran (*refferel to an attendance center*),
- 11) Penahanan rumah (*house-arrest*),
- 12) Pembinaan nonlembaga lain (*any other mode of non-institusional treatment*), dan
- 13) Kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut di atas.

Berdasarkan kutipan dari catatan berjudul Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Satjipto Raharjo (Hadi Supeno, 2010:13) menawarkan apa yang disebut hukum progresif, yakni:

Hukum Progresif yaitu hukum yang tidak sekadar mendasarkan pada kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yg lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya prosedur formal dan apa yang tersurat, tetapi yang lebih penting bagaimana mencapai tujuan akhir dari proses hukum, yakni keadilan. Agar hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan, acuannya bukan semata-mata pada aspek legal formal, melainkan nurani dan moral kemanusiaan.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-undang Pengadilan Anak merupakan aturan khusus yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* terhadap KUHPidana yang bersifat umum.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah setiap anak yang disangka, didakwa, dan terbukti melakukan tindak pidana tertentu. Undang-undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa, anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Anak yang dapat dikategorikan sebagai anak nakal dalam Undang-undang

Pengadilan Anak adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan lain yang terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal dapat dijatuhkan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan ataupun tindakan. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, sedangkan Pasal 24 mengatur tentang tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- 1) Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :
 - a) Pidana penjara;
 - b) Pidana kurungan;
 - c) Pidana denda, atau;
 - d) Pidana pengawasan,
- 2) Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, berupa :
 - a) Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau;
 - b) Pembayaran ganti rugi.
- 3) Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran kepada anak nakal. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 UU Pengadilan Anak adalah :
 - a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau;

- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

1) Pidana Penjara bagi Anak

Penjatuhan pidana bagi anak berbeda dengan pidana pada orang dewasa. Pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan, pidana mati dan penjara seumur hidup untuk alasan apapun tidak dapat dijatuhkan kepada anak. Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut:

- a) Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- c) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- d) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

Poin ke empat dalam Pasal 26 ini sangat jelas menekankan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidaklah dapat diancamkan pidana penjara, tetapi hanya dapat diancam tindakan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa usia

dibawah 12 (dua belas) tahun, dikategorikan sebagai usia rentan di mana anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Pidana Kurungan bagi Anak

Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama haruslah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3) Pidana Denda bagi Anak

Sama halnya dengan peraturan sebelumnya Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur mengenai penjatuhan pidana denda bagi anak di mana pidana yang dijatuhkan paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib latihan kerja.

4) Pidana Pengawasan bagi Anak

Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan bagi anak diatur melalui peraturan pemerintah. Pidana pengawasan bagi anak berdasarkan ketentuan :

- a) Tenggang waktu pidana pengawasan pada anak ialah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;

- b) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa; sedangkan pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pada dasarnya hukuman diberikan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya dalam hal ini bagi anak nakal yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun, penjatuan pidana terhadap anak diberikan suatu kekhususan atau keringanan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini didasari oleh alasan bahwa anak adalah pribadi yang masih labil dan belum matang dalam berpikir.

Kendatipun tiada kesalahan yang dapat lolos dari jeratan hukum, namun ancaman pidana bagi anak murni bertujuan untuk membina pola pikir anak ke arah yang lebih baik. Bukan untuk menimbulkan semata-mata efek jera terhadap anak yang mungkin saja belum mengetahui secara pasti bahwa hal yang telah diperbuatnya itu adalah salah. Apalagi bila kita mengingat asas hukum pidana yakni penjatuan pidana bersifat *ultimum reemedium* yang berarti penjatuan pidana merupakan upaya terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila upaya lain dirasa telah tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi.

b. Prinsip Penerapan Sanksi Pidana bagi Anak Nakal

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip penerapan sanksi pidana bagi anak nakal pada dasarnya dirangkum berdasarkan kriteria di bawah ini:

- 1) Batas umur anak nakal yang boleh diajukan ke persidangan anak adalah minimal 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat (1)). Jadi, selain penggolongan di atas, maka persidangan diajukan ke persidangan dewasa,
- 2) Pidana dan tindakan yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 22),
- 3) Termasuk pula ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain :
 - a) Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak harus lah paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Berdasarkan Pasal 26 ayat (1)),
 - b) Apabila diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak diganti dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun (Berdasarkan Pasal 26 ayat (2)),
 - c) Apabila belum mencapai 12 tahun, melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup,

maka anak nakal dapat diberikan sanksi tindakan berupa anak tersebut diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 24 ayat (1) huruf b),

- d) Apabila usia anak nakal belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan saja (Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) jo Pasal 24),
- e) Mengenai pidana kurungan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Berdasarkan Pasal 27),
- f) Pidana denda yang diberikan kepada anak haruslah paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Berdasarkan Pasal 28 ayat (1)),
- g) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh anak tersebut, maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dan (3)),
- h) Selanjutnya mengenai pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Berdasarkan Pasal 29 ayat (1)), dan

- i) Sanksi terakhir yaitu pidana pengawasan yang dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan (Berdasarkan Pasal 30).

Dalam kenyataannya, pemidanaan bertentangan dengan pengertian hukum itu sendiri karena menurut Hadi Supeno (2010:177):

- a) Anak-anak melakukan kenakalan sering di luar kesadarannya, lebih sebagai refleksi spontan yang sering tidak bisa dikontrol karena perbuatan yang bersifat spontan harus menerima hukum pemidanaan,
- b) Pemidanaan di Indonesia seringkali berlangsung lama, dan rumit, sehingga dipastikan anak yang dikenakan pidana akan sangat menderita,
- c) Anak adalah produk sosial. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan perlakuan yang mereka terima dari orang dewasa dan lingkungan sosial. Jadi, sangat tidak adil bila anak hanya karena melakukan kebiasaan orang dewasa harus menanggung pidana,
- d) Walaupun anak dipidana berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, tetapi karena Undang-undang tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan umum, perlakuan aparat hukum terhadap anak akan sama terhadap orang dewasa. Sehingga, banyak hak yang tidak dipenuhi dan melanggar hukum,
- e) Berdasarkan data empiris, pelaku kenakalan anak berasal dari keluarga yang tidak mampu, miskin, dan papa. Sehingga pemidanaan terhadap mereka tidak akan membantu mobilitas vertikal anak tetapi semakin menambah derita anak,
- f) Bahwa perkembangan pemikiran hukum pidana yang megedepankan tindakan daripada pidana telah muncul lama di Belanda dan menarik minat banyak pihak karena dirasa lebih efektif,
- g) Bahwa justifikasi historis sosiologis mencegah pemidanaan anak dengan memberikan prioritas tindakan kepada anak nakal merupakan bentuk pembinaan anak yg diutamakan.

Adapun prinsip umum perlindungan anak yang harus senantiasa ditegakkan menurut Hadi Supeno (2010:53), yaitu:

- a) Prinsip nondiskriminasi,
- b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*),
- c) Prinsip hak hidup, klangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*), dan
- d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Menurut Hadi Supeno (2010:90) juga terdapat prinsip keadilan bagi anak yang juga patut diterapkan dalam peradilan anak, antara lain:

- a) Pelaku kenakalan anak adalah korban,
- b) Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama,
- c) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak,
- d) Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi,
- e) Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya,
- f) Setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi,
- g) Setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang,
- h) Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum,
- i) Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuanj salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak,
- j) Perenggutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat,
- k) Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak didaerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang

cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi *HIV* atau *AIDS*,

- l) Pendekatan peka *gender* harus diambil disetiap langkah, stigmasi dan kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran *gender*-nya sebagai anak perempuan,
- m) Mengembangkan perspektif *futuristis* dengan meniadakan penjara anak.

Hadi Supeno (2010:17) mengaitkan hal tersebut dengan Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan, menurutnya:

Sebaik apa pun Lapas, itu tetaplah tempat pemidanaan anak. Disinilah jalan cerdas sebagai refleksi bangsa beradab harus ditunjukkan, dengan mencari alternatif tindakan yang mampu mendidik, membina, dan menuntun anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjadi generasi yang bertanggungjawab terhadap dirinya, masyarakat, bangsa, dan kehidupan luas. Hal ini bisa dilakukan bila kita mengembangkan apa yang disebut sebagai *juvenile justice system*, yakni konsep rehabilitasi mental dengan meletakkan prinsip-prinsip HAM (Hak Azasi Manusia), jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, serta partisipasi masyarakat dalam mencari jalan keadilan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Hukum di Indonesia pada dasarnya haruslah ditegakkan, bukan hanya dengan pemikiran normatif belaka, tetapi juga melalui pertimbangan lain seperti faktor internal dan eksternal dari seorang hakim dalam memutus setiap perkara di mana pelakunya adalah seorang anak. Sebab, anak adalah aset negara yang harus diberi pelajaran dan kematangan mental, bukan objek pemuas nafsu sesaat dari para pembual yang hanya memikirkan rasa keadilan dari satu pihak saja

mengenai ancaman hukuman yang harus diderita oleh anak yang melakukan suatu tindak pidana.

D. Ketentuan Pidana Perbuatan yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

1. Sengaja menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338 KUHPidana.

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, maker mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Kejahatan ini dinamakan makat mati atau pembunuhan.

- Barang siapa

Yangdimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan jiwa (*Geestelijkevermogen*) dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

- Sengaja

Adanya kesengajaan sebagai niat atau maksud

- Menghilangkan nyawa orang lain

Kesengajaan membunuh (merampas nyawa) orang lain itu dilakukan segera setelah timbul niat sehingga tidak ada waktu untuk berfikir dengan tenang.

2. Penganiayaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam hal ini penganiayaan yang dimaksud adalah dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan menyebabkan perasaan tidak enak, perasaan sakit, menyebabkan luka.

3. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHPidana.

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.

4. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 310 UU RI Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum.

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan

pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan, faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Makassar.

Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab Makassar merupakan salah satu kota besar dikawasan Indonesia Tengah yang tingkat kejadian tindak pidana anaknya menempati urutan XII dari seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan ini pun terjadi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana menyembunyikan orang yang bersalah ini, khususnya jaksa dan hakim yang menangani kasus ini.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b) Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak terhadap Perkara Nomor: 1064/Pid.B/2010/Pn.Mks

1. Posisi Kasus

Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam putusan

No. 1064/Pid.B/2010/PN.MKS yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 mei 2010, sekira jam 19.00 Wita, dijalan Batua Raya dekat dengan jalan Batua Raya III Makassar, telah terjadi Kecelakaan Lantas, yang mengakibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha Fiz- R, No. Pol DD 5100 AO, yang dikendarai oleh tersangka MUH. YUNUS YUSUF, membonceng MUH. AKBAR tabrakan denganpejalan kaki korban Piter yauri. Jlan Batua Raya (Tempat Kejadian Perkara) adalah jalan yang dapat dilalui dua arah yaitu dari arah utara keselatan dan pada saat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas keadaan jalanan lurus beraspal, rata basa serta keadaan kuaca gerimis. Sebelum hingga terjadinya kecelakaan lantas itu, sepeda motor yamaha Fiz-R No. DD 5100 AO, yang dikendarai oleh tersangka MUH. YUNUS YUSUF , bergerak dari arah utara keselatan pada jalan Batua Raya Makassar, dengan kecepatan 60Km/ jam, sedangkan pejalan kaki (korban) PITER YAURI, berjalan kaki dari rah timur kebarat menyebrang jalan Batua Raya Makassar. Keterangan saksi MUH. AKBAR, selaku yang diboceng oleh tersangka bahwa dari jarak jauh/ sebelum jarak 5 meter arah pandangannya tidak kedepan (merunduk) sehingga ia pun tidak melihat pejalan kaki (korban) tersebut dan saat MUH. YUNUS (tersangka) berteriak "awas" lalu arah pandangannya kedepan. MUH. AKBAR, selaku yang dibonceng tersangka menjelaskan bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan ia melihat pejalan kai (korban) setelah arah pandangannya kedepan dan jaraknya kepejalan kaki sudah sekitar 5 (lima) meter dan korban berjalan kaki didepan sebuah mobil pete-pete (angkot) yang berhenti disebelah kiri/ timur jalan dan saksi MUH. AKBAR tahu kalau arah pandangan yangmemboncengnya

(tersangka) tetap kedepan dan tidak bicara serta menoleh kepadanya. Bahwa tersangka Muh.Yunus pada jarak jauh tidak melihat pejalan kaki (korban) karena terhalang pandangannya dengan sebuah mobil pete-pete yang sedang berhenti disebelah kiri / timur jalan dan pada jarak sekitar 5 meter lalu tersangka melihat korban yang berjalan di depan mobil pete-pete yang berhenti tersebut. Sesaat sebelum terjadinya tabrakan, tersangka Muh.Yusuf Yunus sedang melambung/mendahului pada posisi kanan kendaraan yakni sepeda motor sehingga pergerakan sepeda motor tersangka semakin serta tersangka sudah tidak dapat memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan. Tersangka telah mengetahui / melihat didepannya ada sebuah mobil pete-pete (kendaraan umum) yang berhenti menurunkan/menaikkan penumpang dan serta telah mengetahui/melihat pejalan kaki yang menyebrang jalan namun tersangka tidak mengurangi kecepatan atau memperlambat laju pergerakan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan dengan pejalan kaki (Korban). bagian perkenaan sepeda motor tersangka saat terjadi tabrakan yakni bagian sebelah kiri sedangkan perkenaan terhadap pejalan kaki (korban) pada bagian kaki dan dengan adanya perkenaan tabrakan tersebut pergerakan sepeda motor tersangka terjatuh dan terseret beberapa meter kedepan sedangkan pejalan kaki terlempar jatuh kepinggir sebelah timur jalan. Pada saat tersangka MUH. YUSUF YUNUS, mengendarai sepeda motor kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas keadaan kesehatan dan fisik tersangka dalam keadaan sehat dan baik dan perlengkapan sepeda motor lampu utama menyala serta dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK) maupun surat izin mengemudi (SIM C). Keterangan saksi YOSEPH YAURI, selaku anak kandung dari pejalan kaki (korban) PITER YAURI, menjelaskan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas/ tabrakan, keadaan bapaknya tidak mengalami sesuatu penyakit dan dalam keadaan sehat-sahat. Disaat terjadi kecelakaan tersebut, perkenaan sepeda motor tersangka, yakni pada bagian depan, ban depan sepeda motor sedangkan pejalan kaki (korban) pekenaan pada tubuh samping kiri korban. Dari hasil keterangan saksi-saksi dan tersangka, bahwa peristiwa kecelakaan lantas tersebut di atas, tidak ada unsur kesengajaan, hal ini dibuktikan yang terlibat kecelakaan lantas, tidak saling kenal dan mengenal, serta tidak pernah berselisih paham sebelumnya. Akibat kecelakaan lantas tersebut, pejalan kaki (korban) PITER YAURI, mengalami luka-luka dan meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian di rumah sakit Ibnu Sina Makassar. Sesuai Undang- Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan tersangka MUH. YUSUF YUNUS, melakukan tindak pidana yang sekarang ini belum mencapai umur 18 tahun serta belum menikah yang di kuatkan

akte kelahiran serta ijazah tersangka. Hasil visum et repertum dari rumah sakit Ibnu Sina Makassar, nomor: 018/VER/RSIS/YW-UMI/VI/2010, tanggal 2 Juni 2010.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus diatas maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama :Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Atau
- Kedua :Pasal 359 KUHP

Bahwa oleh karena dakwaannya disusun secara alternative, maka pembuktiannya langsung pada dakwaan yang di anggap oleh jaksa penuntut umum paling benar / paling terbukti yakni pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang Unsur-unsur nya sebagai berikut:

Setiap Orang

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya . Bahwa Muh Yusuf Yunus yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang identitasnya dalam surat dakwaa Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. Muh. Yusuf Yunus sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa MUH.YUSUF YUNUS yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Fiz.R No.Polisi DD 5100 AO yang bergerak dari arah utara ke selatan pada Jl. Batua Raya Makassar dengan kecepatan 60 km/jam dan pada saat terdakwa sedang mengemudikan sepeda motornya kemudian dari jarak sekitar 5 (lima) meter didepan terdakwa sesudah melihat korban Lk. PITER YAURI yang sedang berjalan kaki dan hendak menyeberang jalan dari arah utara ke barat pada Jl. Batua Raya Makassar, melihat hal tersebut seharusnya terdakwa menghentikan atau mengurangi kecepatan laju kendaraannya dan memberi kesempatan kepada korban untuk menyeberang jalan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan tetap menjalankan kendaraannya tanpa mengurangi kecepatan laju sepeda motornya, sehingga pada saat terdakwa dari sisi kanan sebuah mobil angkutan umum yang sedang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri ternyata korban sudah berada didepan mobil angkutan umum tersebut untuk menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak dapat lagi menghindarinya lalu sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban Lk. PITER YAURI lalu terdakwa bersama sepeda motor terseret kedepan sedangkan korban terlempar keluar di pinggir jalan, sehingga akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Lk.PITER YAURI mengalami luka-luka dan akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit Ibnu Sina Makassar atau setidaknya-tidaknya sesaat setelah kejadian.

Hal tersebut didukung pula dengan adanya alat bukti surat berupa Visum et repertum dari rumah sakit Ibnu Sina Makassar No.018/VER/RSIS/YW-UMI/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang di tanda tangani oleh dr.WIRA, yang dalam pemeriksaan terhadap Lk. PITER YAURI, Pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, keluar darah dari telinga, hidung dan mulut
- tampak bengkak pada kepala bagian kanan seluas 4 cm
- Tampak Bengkak pada kedua mata

Kesimpulan : Bengkak pada kepala bagian kanan dan bengkak pada kedua mata, keluar darah dari telinga, hidung,mulut, akibat benturan benda tumpul.

Keterangan : Meninggal

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dari hasil analisis di atas penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik yang di dakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena dakwaan pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Berdasarkan uraian yang di maksud diatas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini , maka jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Nomor Register Perkara PDM-848/Mks/Ep/07/2010 tertanggal 08 Juli 2010 negeri Makassar menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH.YUSUF YUNUS, terbukti bersalah melakukan tidak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.YUSUF YUNUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz-R No.Pol: DD 5100 AO, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-. (Seribu Rupiah)

Berdasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan persidangan maka hakim dengan ini :

Mengadili

1. menyatakan bahwa terdakwa muhammad Yusuf Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Yusuf Yunus Tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unti sepeda motor merk Yamaha F1ZR No.Polisi DD 5100 AO, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000 (seribuRupiah).

Demikian diputuskan oleh hakim pengadilan negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 oleh Pudjo Hunggul,S.H. Sebagai hakim tunggal, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Nuriyah Awad,S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Andi Lifiah, S.H Sebagai Penuntut Umum dan terdakwa

3. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, dipersidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan, dan adanya kesalahan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 1064/Pid.B/2010/PN.MKS

1. Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. menyatakan bahwa terdakwa muhammad Yusuf Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Yusuf Yunus Tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR No.Polisi DD 5100 AO, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000 (seribuRupiah).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan sejak tanggal 25 Mei 2010;
2. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi didampingi oleh orang tua terdakwa dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Makassar;
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa;
4. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
5. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

6. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-848 /MKS / Ep / 07 / 2010 tertanggal 9 Agustus 2010;
7. Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon:
 - a. Agar menghukum terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum,
 - b. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
8. Hakim mempertimbangkan bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum bertetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa bertetap pada pembelaannya;
9. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-848/Mks/Ep/07/2010 tertanggal 8 Juli 2010
10. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;
11. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - a. Saksi Yosep Yauri
 - Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang

- dialami orangtua saksi yakni Lk PITER YAURI yang mengakibatkan orangtua saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang dialami orangtua saksi tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 mei 2010, sekira pukul 19.30 wita di jalan batua raya depan lorong III makassar dan adapun yang menabrak orangtua saksi tersebut adalah sebuah sepeda motor;
 - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi berada di jalan ponegoro makassar dan penyampaian tetangganya adalah bapaknya di tabrak dan segera pulang kerumah dan setelah adanya penyampaian itu, saksi langsung pulang kerumahnya dan tetangganya mengatakan bahwa pak piter sudah ada dirumah sakit ibnu sina makassar dan saat itu juga ia langsung pergi kerumah sakit tersebut;
 - Bahwa benar setelah dirumah sakit ibnu sina makassar maka saksi melihat orang tuanya diruang gawat darurat rumah sakit ibnu sina makassar dan luka-luka yang dialami oleh bapaknya yakni dibagian kepala robek, mata bengkak, pendarahan telinga dan hidung serta dalam keadaan tidak sadarkan diri dan beberapa jam kemudian sekitar jam 01.30 wita pada hari senin tanggal 24 mei 2010 bapaknya meninggal dunia dirumah sakit tersebut.
 - Bahwa benar saksi yakin kalau orang tua saksi tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yakni ditabrak oleh sebuah sepeda motor;
 - Bahwa benar orang tua saksi tersebut telah dikebumikan pada hari rabu tanggal 26 Mei 2010 di pemakaman umum Bollangi kabupaten gowa.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP.

b. Saksi Muhammad Akbar

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di jalan Batua Raya Makassar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah motor bebek merk Yamaha F1ZR yang No. Polisinya saksi tidak ketahui yang dikemudikan oleh terdakwa Muh. Yusuf Yunus Menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa Benar pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh Lk. Rizaldy.
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sepdamotor yang di kemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah utara ke selatan pada Jl. Batua Raya

makassar dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, sedangkan pejalan kaki yang menjadi korban tersebut bergerak dari arah timur ke barat dan sedang berjalan menyeberang jalan pada Jl. Batua Raya Makassar.

- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut arah pandangan saksi kedepan dan saksi sudah melihat korban pejalan kaki tersebut dari jarak 5 meter didepan namun sebelumnya saksi sedang menunduk dan setelah terdakwa berteriak dengan mengatakan “Awat” maka saksi langsung melihat kedepan;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menabrak korban pejalan kaki tersebut, pandangan terdakwa ke depan dan tidak menoleh dan tidak sedang berbicara dengan saksi;
- Bahwa benar yang saksi lihat yang menghalangi pandangan terdakwa sehingga tidak melihat korban pejalan kaki tersebut adalah karena ada mobil pete-pete dan didepan mobil pete-pete tersebut korban pejalan kaki yang menjadi korban tersebut sedang berjalan untuk menyeberang jalan;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat terdakwa telah melambung sebuah sepeda motor dan saat itu pula korban pejalan kaki sedang berjalan didepan mobil pete-pete yang sedang berhenti;
- Bahwa benar adapun perkenaan tabrakan tersebut yakni dibagian kaki korban sedangkan perkenaan sepeda motor terdakwa yakni pada stand kaki kiri;
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut saksi melihat korban pejalan kaki tersebut terjatuh dan terlempar sekitar 2 (dua) meter keluar dipinggir jalan, sedangkan sepedamotor terdakwa langsung terjatuh dan terseret kedepan;
- Bahwa benar setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi maka saksi langsung tidak sadarkan diri, sehingga saksi tidak mengetahui keadaan korban pejalan kaki tersebut dan juga keadaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir pinggir kanan, luka lecet di siku kiri dan lutut kiri saksi;
- bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mendengar kalau korban pejalan kaki yang ditabrak oleh terdakwa telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar/sketsa TKP yang diperlihatkan kepadanya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP.

c. Saksi Obet Tandi Rura

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di jalan Batua Raya Makassar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah motor bebek merk Yamaha F1ZR yang No. Polisinya saksi tidak ketahui yang dikemudikan oleh terdakwa Muh. Yusuf Yunus Menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan pejalan kaki tersebut meninggal;
- Bahwa benar sebelum hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca ditempat kejadian cerah malam hari, jalan lurus beraspal rata, basah dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa sudah melihat korban pejalan kaki tersebut dari jarak sekitar 5 meter dan saat itu korban berjalan di pinggir jalan sebelah timur dan saat itu korban hendak menyeberang jalan;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa melambung sepeda motor pada posisi sebelah kanan dan saat itu ada sebuah mobil angkot yang berhenti di sisi sebelah kiri jalan dan didepan mobil angkot tersebut ada korban yang saat itu berjalan kaki untuk menyeberang jalan;
- Bahwa benar adapun perkenaan sepeda motor terdakwa dengan korban pejalan kaki tersebut yakni di bagian stand kaki kiri sepeda motor terdakwa, sedangkan korban pejalan kaki tersebut yakni di bagian kakinya;
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut maka sepeda motor terdakwa langsung terjatuh dekat tempat tabrakan, sedangkan korban pejalan kaki tersebut terlempar ke depan dan keluar jalan sebelah timur;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sempat melihat korban pejalan kaki tersebut mengalami luka dikepalanya dan mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C ;

- Bahwa gambar sketsa TKP yang dibuat oleh petugas lalu lintas sudah benar;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
 - Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP;
12. Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya dengan jujur dan mengakui kesalahannya;
13. Hakim mempertimbangkan berdasarkan penemuan fakta-fakta di persidangan maka terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan delik kelalaian yang menyebabkan kematian
14. Hakim mempertimbangkan status terdakwa yaitu seorang anak sesuai dengan akta kelahiran terdakwa No.4521/IST/CS//2008 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 24 Juni 2008 di mana terdakwa lahir tanggal 15 maret 1993, maka usia terdakwa sekarang 17 tahun lebih, sehingga diancamkan $\frac{1}{2}$ ancaman pidana bagi orang dewasa;
15. Hakim mempertimbangkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar; bahwa apabila perbuatan terdakwa terbukti, maka disarankan sebaiknya dikenakan sanksi berupa sanksi pidana

bersyarat di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Makassar;

16. Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak.
17. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa;
 - a. Hal-hal yang memberatkan, yaitu:
 - Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia;
 - b. Hal-hal yang meringankan, yaitu:
 - Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
 - Terdakwa anak yang masih dibawah umur yakni berumur 17 tahun
 - Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
18. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak serta Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar.

2. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan

putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus ini yaitu **Pudjo Hunggul S.H, S.H** pada tanggal 20 september 2011 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menerangkan bahwa:

"Dalam memutus suatu perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti undang-undang nomor. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak serta harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam hal ini keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa, dan berbagai macam pertimbangan lainnya termasuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan tentang kondisi si anak".

Penjatuhan pidana dalam kasus ini Hakim memutuskan 4 (empat) bulan, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Hakim mempertimbangkan usia Terdakwa masih dikategorikan sebagai anak yakni 17 tahun. Jaksa pun demikian, Jaksa menuntut cuma 8 (delapan) bulan, tidak sampai setengah dari hukuman maksimal dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, dengan pertimbangan berdasar pada berita acara pemeriksaan/ olah kasus yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum

Sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 yang menjelaskan tentang pembedaan bagi pelaku delik kelalaian yang menyebabkan kematian dengan pidana maksimal bagi yang melakukan delik ini adalah hukuman penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dinilai Penulis sudah tepat, karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini kita bisa terlihat dari vonis yang dijatuhkan pada pelaku meski korbannya mengalami kematian namun korban tidak memiliki unsur kesengajaan di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam memustukan perkara putusan Nomor : 1062/Pid.B/2010/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak yang dalam hal ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas hendaknya senantiasa diterapkan secara efektif dengan pengawasan dari pihak orang tua agar kecelakaan lalu lintas yang seperti ini terminimalisir di tengah masyarakat
2. Setiap perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, agar hakim senantiasa mempertimbangkan putusan dengan tetap mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menimbang pelaku dalam perkara ini masih di kategorikan sebagai anak.